

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang, Waluyo. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Edi, Setiadi. & Kristian. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Kencana.
- Evi, Hartanti. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono, Reksodiputro. 1997. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muladi. 2022. *Penegakan Hukum Dan Peningkatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT. Alumni.
- Mukti, Fajar. 2013 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O. Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- PAF Lamintang. 1996. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Negara Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2004. *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal

Armunarto dan Erlyn Indarti, "Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 16(1), 28.

Gita Santika. "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Hukum*, 16(1), 77.

Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana dan Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum. *Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, hlm. 7.

Muhammad Fatahilah Akbar. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila," *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, 37(1), 89.

M. Yuhdi. "Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), hlm 96.

Rudiansyah. "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 10(1), 155.

D. Tesis

Abdi Reza Fachlewi Junus. 2012. "Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Dimas Sigit Tanugraha. 2022. "Efektivitas Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara." Tesis. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.

Ferdy Saputra. 2013. "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI." Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

E. Internet

“*Pengertian Kejaksaan.*” <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>. Diakses 30 Juli 2022.

“*Pengertian Kejaksaan.*” <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>. Diakses 1 Agustus 2022.

